



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2024**





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. LKjIP yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi negara.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan dimasa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2024, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



PARMINTO., S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710612 199301 1 001



EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 yang didalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, DP3AP2KB Kota Blitar mengemban dua misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani- Rohani, Cerdas Berkarakter

Berdasarkan dua misi tersebut, ditetapkanlah Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menjadi 5 (lima), yaitu 1) Meningkatnya pemberdayaan gender; 2) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan; 3) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB; dan 5) Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,20	67,63*	91,14%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,93	100,51%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,32)	A (85,66)	100,39 %

Catatan : Realisasi IDG adalah realisasi tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebesar Rp 9.782.928.433,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan persentase serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 92,38%. Dari sasaran Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, ada yang sesuai target ataupun di atas target. Berikut realisasi anggaran per program dalam pencapaian kinerja :

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.505.746.980,00	4.358.001.788,00	96,72%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.120.024.994,00	1.080.467.802,00	96,47%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.317.420,00	209.785.892,00	62,93%
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160.231.200,00	156.105.380,00	97,43%
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	404.612.450,00	297.587.090,00	73,55%



VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	197.600.000,00	162.931.175,00	82,46%
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.054.957.978,00	1.788.148.019,00	87,02%
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.437.411,00	983.538.200,00	97,72%

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,14*	96,47	0,95
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00	96,47	1,04
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	62,94	1,59
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	80,32	1,25
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	100,51*	90,05	1,13
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,39	96,72	1,04

Prestasi yang berhasil diraih DP3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2024 ini yaitu

:

1. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang telah berhasil membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Desa/Kelurahan sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang menginstruksikan Pembentukan kampung KB di Desa/Kelurahan, yang diberikan pada tanggal 22 April 2024



2. Terbaik 1 Apresiasi Bina Keluarga Remaja Percontohan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diberikan kepada BKR Garuda Kelurahan Gedog Kota Blitar pada tanggal 10 Mei 2024
3. Juara 2 Kampung KB Berseri Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kategori Kota
4. Juara 2 Rumah Dataku Konvensional yang diberikan kepada Kampung KB Sentosa Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo
5. Standarisasi PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) Tahun 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak kategori Pratama yang diberikan kepada Perpustakaan MTs Negeri 1 Kota Blitar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR HADIR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. DASAR HUKUM	8
E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS	12
F. ISU – ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN	22
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022	23
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2022	41
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA	44
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL	46
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	48
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	57
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	60
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	63
C. PRESTASI / PENGHARGAAN	65
BAB IV PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. LANGKAH PERBAIKAN	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	17
TABEL II.2 Target Kinerja Sasaran Strategis	19
TABEL II.3 Anggaran per Program	20
TABEL III.1 Skala Pengukuran Kinerja Sasaran	23
TABEL III.2 Pencapaian Kinerja DP3AP2KB	25
TABEL III.3 Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan	37
TABEL III.4 Pencapaian Target Pada Perjanjian Kinerja	37
TABEL III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024	41
TABEL III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhi Periode Renstra 2021-2026	44
TABEL III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Kab/Kota Lain	47
TABEL III.8 Persentase Realisasi Anggaran sesuai Jenis Belanja	48
TABEL III.9 Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan	49
TABEL III.10 Persentase Relaisai Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49
TABEL III.11 Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54
TABEL III.12 Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan	58
TABEL III.13 Capaian Kinerja dan Anggaran	60
TABEL III.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024. Pelaksanaan RKPD tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dengan tema **“KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, dan Bermartabat”**. Oleh karena itu pencapaian kinerja dalam LKjIP tahun 2024 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2024 serta target RPJMD 2021-2026.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kedudukan :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar

Tugas :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk



dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan;
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga



- berencana;
- l. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatusahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 - m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

1. Kepala Dinas



2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
4. Bidang Perlindungan Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

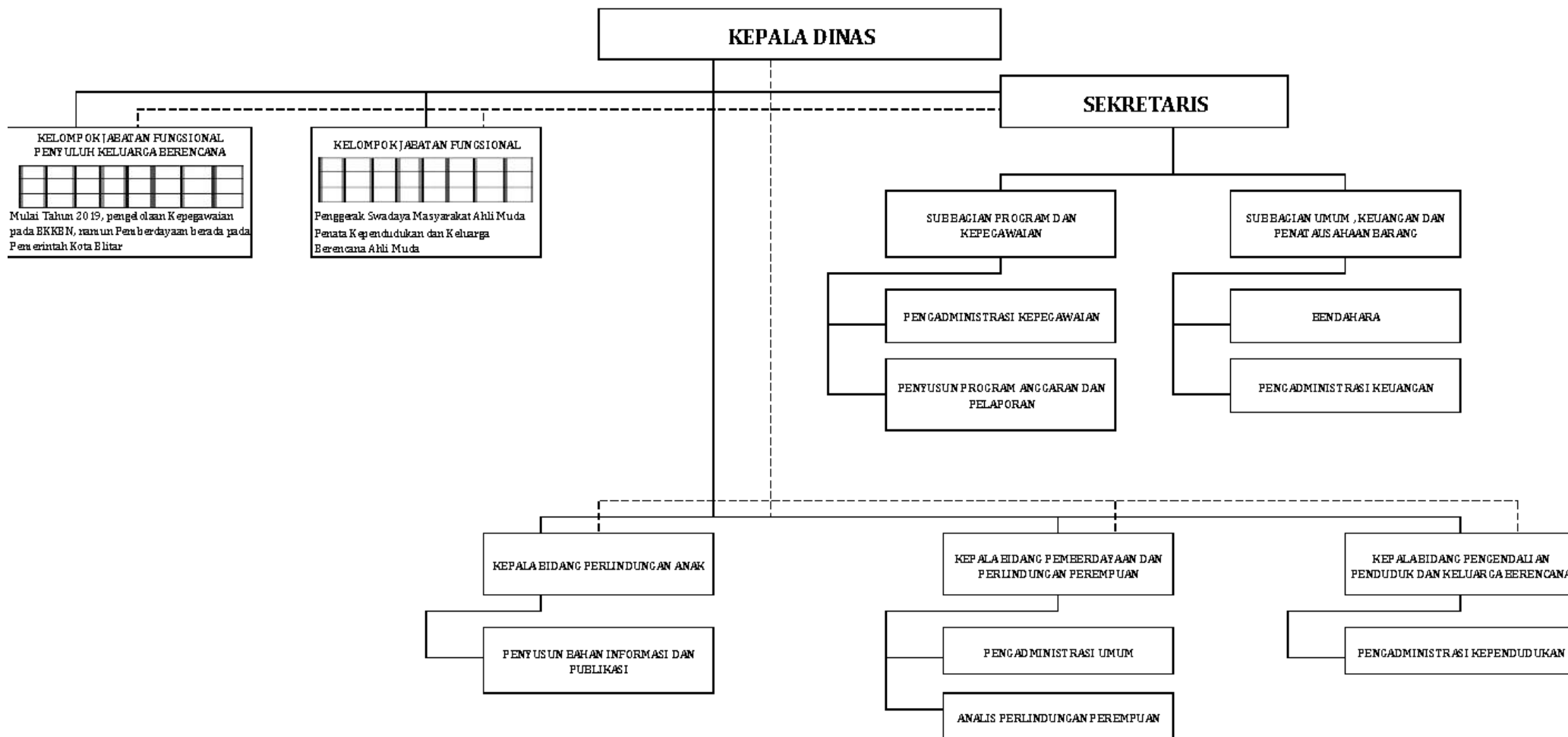
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja



6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hirarkhis.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah sebagai berikut :





C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2024 dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;



13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran



- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.



E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, budaya dan pelayanan publik yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. DP3AP2KB Kota Blitar dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dalam pemenuhan harapan tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
3. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana

F. ISU – ISU STRATEGIS

DP3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan. Kesenjangan tersebut mengindikasikan pelaksanaan



- kebijakan/program/kegiatan belum memperhatikan isu gender
2. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender belum komprehensif pada seluruh proses pembangunan; kurangnya daya ungkit strategi pengarusutamaan gender dalam menyelesaikan isu nasional/daerah
 3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
 4. Tingginya angka kekerasan pada anak
 5. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang tidak ber-KB
 6. Tingginya angka kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Rencana Program jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra DP3AP2KB Kota Blitar periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan juga evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya. Selain itu juga identifikasi dan telaah dari RTRW.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2024, serta juga menyebutkan program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.



A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 2026

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar termuat dalam Dokumen Renstra PD yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Visi dan Misi Pembangunan Kota Blitar dan bersifat indikatif.

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- III. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
- IV. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- V. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagai mana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menetapkan Rencana Strategis 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan DP3AP2KB Kota Blitar lima tahun kedepan, sehingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka tujuan Renstra Dinas P3AP2KB mengacu pada 2 (Dua) misi Kota Blitar yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Berdasarkan dua misi tersebut, ditetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB, sebagai berikut :

Tabel II. 1
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
DP3AP2KB KOTA BLITAR

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan gender	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
				Peningkatan kapasitas perempuan
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan partisipasi Peserta KB aktif
				Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB dalam
				pengendalian usia perkawinan di Bawah umur (15-19 tahun)
				Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
				Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai kinerja DP3AP2KB Kota Blitar, dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini didasarkan kepada Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat indikator kinerja beserta targetnya.

Perjanjian Kinerja pada DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 ada 4



(empat) tingkatan yaitu :

- 1) Perjanjian Kinerja antara Kepala DP3AP2KB Kota Blitar dengan Walikota Blitar
- 2) Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
- 3) Perjanjian Kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III atau pejabat fungsional dengan eselon III
- 4) Perjanjian Kinerja antara eselon III atau eselon IV dengan pelaksana

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2
Target Kinerja Sasaran Strategis DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,20
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100 %
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,32)

Untuk melaksanakan sasaran strategis diatas, DP3AP2KB Kota Blitar didukung dengan anggaran pada P-APBD tahun 2024 sebesar Rp. 9.782.928.433,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)dengan rincian per program adalah sebagai berikut :



Tabel II. 3
Anggaran per Program DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.505.746.980,00
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.120.024.994,00
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 333.317.420,00
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 160.231.200,00
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 404.612.450,00
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 197.600.000,00
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 2.054.957.978,00
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.006.437.411,00
	Total	Rp. 9.782.928.433,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi sistem AKIP, Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RENSTRA 2021-2026. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus



sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja dengan kriteria, yaitu :

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA		PREDIKAT
	%	KETERANGAN PROSENTASE	
1	85 % - 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 menggunakan metode seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil



pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut.



TABEL III. 2
PENCAPAIAN KINERJA DP3AP2KB KOTA BLITAR TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	74,20	67,63 *	91,14%	SANGAT BERHASIL
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE KELEMBAGAAN PUG AKTIF	100,00%	100,00%	100,00%	SANGAT BERHASIL
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SANGAT BERHASIL
	PERSENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DISELESAIKAN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SANGAT BERHASIL
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB	TOTAL FERTILITY RATE (RATA-RATA JUMLAH ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU SELAMA MASA REPRODUKSI)	1,94	1,93	101,55%	SANGAT BERHASIL
MENINGKATNYA KINERJA PERAGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	A (85,32)	A (85,66)	100,39 %	SANGAT BERHASIL

Catatan : Realisasi IDG adalah realisasi tahun 2023

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

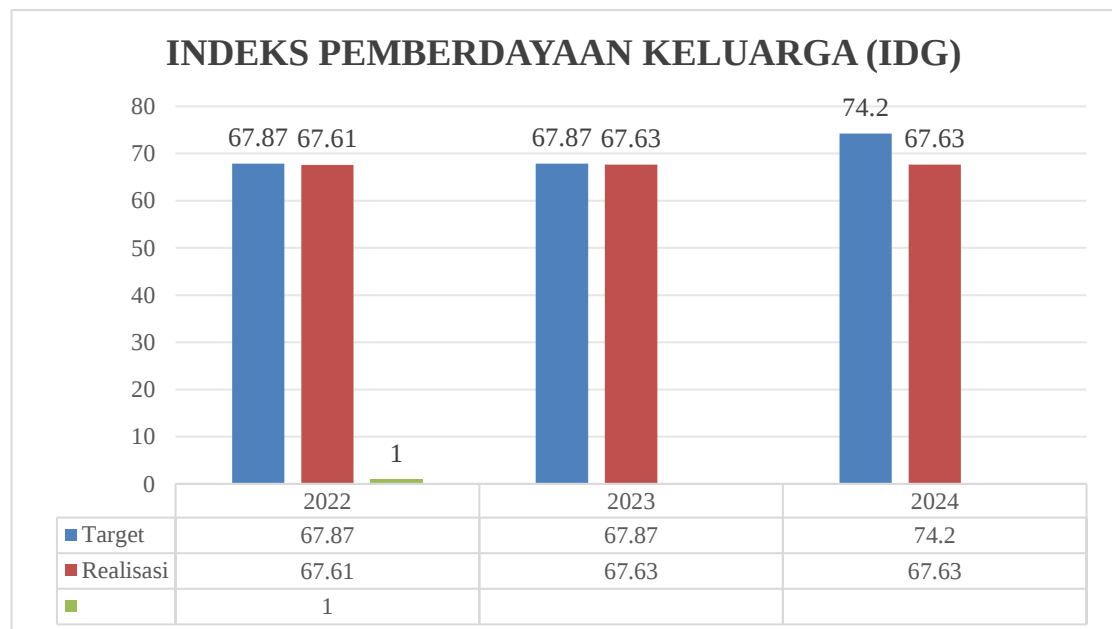
- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Gender; dengan indikator Prosentase capaian kinerja untuk *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*. Target tahun 2024 IDG yang merupakan tujuan yaitu 74,20. *Data* realisasi tahun 2024 masih menggunakan data IDG tahun 2023 yang bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2024 masih dalam tahap pengumpulan data dan akan dipublikasikan pada bulan Maret 2025.



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IDG, yaitu peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang pendidikan, persentase angkatan kerja perempuan yang diiringi lapangan kerja yang tidak bias gender sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang tidak diskriminasi gender dan persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2020-2024 serta perubahan RPJMD 2019-2014 yaitu terwujudnya kesetaraan gender melalui kemudahan akses perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau berpartisipasi; dimudahkan dalam ikut mengambil keputusan atau kontrol pembangunan serta menerima hasil atau manfaat pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :





Faktor yang menyebabkan penurunan dan rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kota Blitar yang menjadi kendala dalam pencapaian target ini adalah :

- a) keterwakilan perempuan di posisi strategis (diambilkan dari jumlah perempuan di parlemen) sejumlah 3 (tiga) orang

Partai Politik Political Parties	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI-Perjuangan	7	1	8
PKB	4	1	5
Partai Golkar	3	-	3
PPP	3	-	3
PAN	2	1	3
Partai Gerindra	2	-	2
Partai Demokrat	1	-	1
Jumlah/Total	22	3	25

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kota Blitar/Secretariat of Regional Parliamentary Assembly of Blitar Municipality

- b) dan sumbangan pendapatan perempuan yang samplingnya hanya diambilkan dari pekerja buruh wanita, sedangkan pekerja wanita di Kota Blitar tidak hanya buruh, tetapi ada juga yang di sektor formal

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	11.310	8.798	20.108
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	3.986	3.928	7.914
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	3.571	1.012	4.583
Buruh/Karyawan/Pegawai Employee	21.337	16.289	37.626
Pekerja bebas Casual worker	3.180	320	3.500
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	3.521	4.400	7.921
Jumlah/Total	46.905	34.747	81.652

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey



Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :

- a) meningkatkan kualitas perempuan di Kota Blitar melalui berbagai program kegiatan peningkatan kapasitas dan advokasi, seperti pelatihan, sosialisasi edukasi, dan lainnya.
 - b) untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen, tidak bisa dilakukan intervensi, Dinas P3AP2KB hanya memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan untuk semakin aktif dan memberikan kontribusi untuk pembangunan
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, dengan indikator persentase Kelembagaan PUG yang aktif, memperoleh capaian sebesar 100,00% dengan predikat **Sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Kelembagaan PUG yang aktif* adalah Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG dibagi jumlah lembaga yang ada di Kota Blitar di kali 100%. Persentase Kelembagaan PUG yang aktif pada tahun 2024 ini sebesar 100,00% dengan persentase capaian 100,00% dengan kategori Sangat berhasil.

Jumlah lembaga di Kota Blitar yang melaksanakan PUG ada 32 lembaga, sedangkan lembaga yang ada di Kota Blitar berjumlah 32 lembaga yaitu :

- a) Dharma Wanita Persatuan (DWP)
- b) Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
- c) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d) PC Fatayat NU Kota Blitar
- e) Persit Kartika Candra Kirana Yonif 511
- f) Persaudaraan Muslimah (Salimah)
- g) Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)
- h) Muslimat NU
- i) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)



- j) Persatuan Istri Veteran Indonesia (PIVERI)
- k) AISIYAH
- l) Dharma Yukni Karini (Pengadilan Negeri)
- m) Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0808
- n) Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI)
- o) Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP)
- p) Bhayangkari
- q) Al Hidayah
- r) Persatuan Wanita Indonesia
- s) Himpunan Wanita Karir
- t) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI)
- u) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- v) Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU)
- w) Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia)
- x) Forum Koperasi Wanita (KOPWAN)
- y) LPMK/RW/RT
- z) PPKBD dan Sub PPKBD
- aa) Forum Kota SEhat
- bb) Forum Puspa
- cc) Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia (KKI)
- dd) Kelompok Wanita Tani (KWT)

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini yaitu :

- a) Adanya regulasi yang digunakan sebagai rujukan dalam mengintegrasikan nilai-nilai PUG yaitu Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
- b) Dukungan /komitmen pimpinan (Kepala Dinas P3AP2KB Kota



Blitar) dan juga semua Kepala OPD Kota Blitar yang diwujudkan pada budaya kerja di masing-masing bidang untuk menginternalisasikan aspek kesetaraan gender di setiap agenda kebijakan/kegiatan

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- a) Masih adanya perangkat daerah yang belum memahami tentang Pengarusutamaan Gender
- b) Perangkat Daerah sudah melakukan penyusunan PPRG tetapi nominal/target anggaran yang dianalisa belum optimal

Tindak lanjut/action plan untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi sasaran ini adalah :

- a) Sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang Pengarusutamaan Gender
- b) Melaksanakan Bimtek Penyusunan PPRG

3) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator :

1. penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan; memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan* adalah persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus perempuan yang dilaporkan. Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100% dengan kategori Sangat berhasil

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan



di Kota Blitar ada 16 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 16 orang.

Perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, penindasan dan penyalahgunaan. Perlindungan perempuan dilakukan melalui berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga terkait.

Faktor pendukung penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar antara lain yaitu :

- 1) Adanya sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Tim)
- 2) Adanya komunikasi yang baik antar pemberi pelayanan mulai dari pengaduan, pelayanan kesehatan ataupun bantuan hukum sehingga kasus selesai
- 3) Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara intensif

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

- a. Belum semua orang memahami tentang Undang-Undang TPKS
- b. Belum semua orang mengetahui keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Adanya pergantian/perubahan anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Untuk menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus tetap 100% antara lain dengan tindak lanjut/action plan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang TPKS
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



c. Meningkatkan kapasitas Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan; memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak* adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100% dengan kategori Sangat berhasil

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan di Kota Blitar ada 29 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 29 orang.





Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhak memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan BPS dan melibatkan K/L terkait telah mengembangkan IPA-IPHA-IPKA sejak tahun 2019. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran capaian pemenuhan hak anak di Indonesia sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran capaian perlindungan khusus anak di Indonesia.

IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah, disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak.

Faktor pendukung dalam memberikan perlindungan anak khususnya dalam penyelesaian kasus kekerasan anak yaitu :

- a. Adanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Tenaga pendamping/konselor
- c. Adanya partisipasi dari masyarakat (keluarga atau lingkungan yang peduli adanya kasus kekerasan pada anak)



Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak untuk penyelesaian kasus kekerasan ini yaitu :

- a. Belum optimalnya Kerjasama dengan Psikolog, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar dan Call Center 112 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- b. Masih terbatasnya kompetensi SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap anak

Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Psikolog, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar dan Call Center 112 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan anak, baik yang datang langsung ataupun melalui Satgas PPA
- b. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang perlindungan anak khususnya dalam pencegahan kekerasan pada anak dengan mengikuti webinar/pelatihan baik di tingkat Kota/Provinsi maupun Nasional; ataupun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

- 4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB dengan indikator Total Fertility Rate (TFR); TFR dari target 1,94 tercapai 1,93 dimana ini menandakan capaian yang baik yaitu sebesar 101,55 % dengan predikat **sangat berhasil**

Formulasi penghitungan indikator sasaran *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)* adalah Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya. Jadi semakin rendah TFR adalah semakin baik.

TFR 1,93 ini mempunyai arti bahwa di Kota Blitar rata-rata perempuan sejak masa usia subur sampai akhir masa reproduksi (usia



15-49 tahun) di Kota Blitar mempunyai anak 2 (dua). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka Jawa Timur yaitu 1,98.

Untuk persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR di Kota Blitar sebesar 64,75% dimana jumlah peserta KB aktif modern sebanyak 13.438 dan jumlah pasangan usia subur sebanyak 20.755. Metode kontrasepsi modern ini meliputi pil, suntik, implan, kondom, KB spiral, vasektomi dan tubektomi.



Peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.



- Faktor pendukung keberhasilan pencapaian TFR ini dipengaruhi oleh adanya komitmen dari pemerintah terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; fasilitas pelayanan KB
- Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian ini yaitu : Rendahnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) muda dalam mengikuti Program KB
- Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :
Optimalisasi Promosi dan KIE Program KB dengan segmentasi sasaran PUS muda melalui Media Elektronik, Media Sosial, Cetak dan Tatap Muka

5) Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah; memperoleh capaian sebesar 102,74 dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :



- o Pada indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi dengan kategori A (85,66) dari target A (85,33) dengan persentase capaian 100,39% dengan kategori Sangat berhasil.

Tabel III.3

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan

Nomer LHP : 700.1.2.9/770/410.050/2024

Tanggal LHP : 2024-07-30

OPD : DP3AP2KB Kota Blitar

Opjek Pemeriksaan : Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2024

Jenis Pemeriksaan : Evaluasi

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
1.	Dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja. Pemantauan capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan telah dilaksanakan, namun target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja kurang menantang. Hal ini ditunjukkan antara lain dari penetapan Target sasaran Renja Tahun 2024 terkait nilai sakip adalah 84, namun pada tahun 2022 nilainya sudah	Melakukan penyesuaian target kinerja Tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan target Renstra. Perbaikan penyesuaian target kinerja Tahun 2025 (Renja), dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan target Renstra.	Surat Pernyataan Kepala Dinas P3AP2KB akan melakukan penyesuaian target kinerja Tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan target Renstra. Renja 2025	Surat Pernyataan SAKIP 2024	0	S	Selesai



No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
	85,32, selain itu indikator lainnya jugayaitu Persentase kelembagaan PUG aktif						
2.	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai, namun aktivitas antar bidang belum menggambarkan hubungan saling berkaitan fungsi lain (Crosscutting)	Menyusun perbaikan skema Crosscutting yang menggambarkan hubungan saling berkaitan antar bidang.	Surat Pernyataan Kepala Dinas P3AP2KB akan menyusun perbaikan skema Crosscutting yang menggambarkan hubungan saling berkaitan antar bidang.	Surat Pernyataan SAKIP 2024		S	Selesai
			Perbaikan skema Crosscutting yang menggambarkan hubungan saling berkaitan antar bidang.	Perbaikan skema crosscutting			
3.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan), namun data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya	Menyajikan data dukung kinerja yang valid dan relevan serta menampilkan sistem informasi pengumpulan data yang dapat dibaca dengan jelas pada penilaian selanjutnya	Surat Pernyataan Kepala Dinas P3AP2KB akan menyajikan data dukung kinerja yang valid dan relevan serta menampilkan sistem informasi pengumpulan data yang dapat dibaca dengan jelas pada penilaian selanjutnya.	Surat Pernyataan SAKIP 2024		S	Selesai
			Bukti data dukung kinerja yang valid dan relevan yang bertanda tangan	Bukti data dukung kinerja yang valid dan relevan yang bertanda tangan			



No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
	relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Data dukung kinerja tidak jelas dan aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja, tampilan tidak jelas alamat aksesnya.		Kepala Dinas, serta menampilkan sistem informasi (alamat link/web) pengumpulan data yang dapat dibaca dengan jelas.	Kepala Dinas. Alamat bukti data dukung kinerja : https://drive.google.com/drive/folders/1EU9hvQbq1JyUyxc6_WP08mfmI_UiEDOW			
4.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagian besar telah ditindaklanjuti namun belum semuanya	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2024	Surat Pernyataan Kepala Dinas P3AP2KB akan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2024.	Surat Pernyataan SAKIP tahun 2024			
			Dokumen dukung tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2024 (rekomendasi no 1,2,3 dan 5).	Dokumen bukti dukung hasil evaluasi akuntabilitas tahun 2024			
				Bukti dukung skema crosscutting			
5.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum mempengaruhi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja	Mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja (LKJiP) Tahun 2024 dengan memuat permasalahan/kendala dalam mencapai kinerja dan rekomendasi yang tepat sehingga selanjutnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan pada perencanaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas P3AP2KB akan mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja (LKJiP) Tahun 2024 dengan memuat permasalahan/kendala dalam mencapai kinerja dan rekomendasi yang tepat sehingga selanjutnya	Surat Pernyataan SAKIP 2024		P	Proses



No	Temuan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status		
					Nilai	TL	Ket.
		selanjutnya	dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan pada perencanaan selanjutnya.				
			Dokumen (LKJiP) Tahun 2024 dengan memuat permasalahan dan rekomendasi yang tepat, dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja selanjutnya.				

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel III.3 berikut.

Tabel III.4
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
DP3AP2KB KOTA BLITAR TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,14 %	V			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	V			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00 %	V			



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00 %	V			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	101,55 %	V			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,39 %	V			
Rata-rata keberhasilan capaian sasaran strategis		100,39 %	Sangat Berhasil			

Catatan : Capaian IDG 2024 masih menggunakan realisasi tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Dinas P3AP2KB ini rata - ratanya 100,39% dengan predikat Sangat Berhasil.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 – 2024

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2024 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2024
DP3AP2KB KOTA BLITAR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,87	67,87	74,20	68,61	67,63	67,63 *	101,09%	99,65%	91,16%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47,26 %	47,28 %	100,00 %	55,03 %	63,3%	100,00%	116,44%	133,88 %	100,00 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,14	2,13	1,91	1,92	1,94	1,93	110,28%	109,86%	101,55%
Meningkatnya kinerja Peragkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	83	85,28	85,32	85,28	85,66	104,04%	102,74%	100,39%

Untuk indikator yang sama antara tahun 2022 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas P3AP2KB sudah bisa mencapai target bahkan ada yang lebih dari 100%.

Tujuan strategis Dinas P3AP2KB yang pertama yaitu meningkatnya pemberdayaan gender ini menunjang Misi Walikota Blitar yang ke 1 yaitu Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Misi ini mengarahkan Kota Blitar sebagai kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penganugerahan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengakuan atas



komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Penghargaan APE ini diberikan setiap 2 tahun sekali. Pada Tahun 2024 tidak ada penilaian APE karena sudah dilakukan di tahun 2023 dan akan dilakukan penilaian pada tahun 2025. Pada tahun 2023, Kota Blitar mendapatkan penghargaan APE dengan predikat Pratama. Pemerintah Kota Blitar terus memperkuat dan melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, menciptakan lingkungan yang aman, adil dan mendukung perkembangan optimal bagi perempuan dan anak-anak di Kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan PUG ini dengan berusaha untuk memenuhi 7 prasyarat PUG yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun indikator prasyarat tadi yaitu Komitmen; Kebijakan atau Program; Sumber daya Manusia dan Anggaran; Kelembagaan; Data, sistem informasi dan bahan informan terkait gender; Metode dan alat; Peran Serta Masyarakat dan dunia usaha.

Pelembagaan PUG merupakan langkah implementasi yang ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan yang responsif gender dapat dilaksanakan secara harmonis, efektif dan berkesinambungan. Pelembagaan PUG tersebut dilaksanakan dalam pengaturan regulasi, pembentukan Tim PUG (Tim Driver dan Tim Focal Point) dan penyusunan petunjuk teknis yang selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Misi 2 Walikota Blitar fokus pada upaya mewujudkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter yang diturunkan ke tujuan strategis Dinas P3AP2KB yaitu meningkatnya pengendalian penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program



Keluarga Berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, yaitu terlalu muda melahirkan (di bawah 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Selain itu program KB dapat menimbulkan rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Capaian TFR antara lain ditunjang dengan penguatan pembinaan KB aktif dan KB baru dimana sasaran KB diutamakan bagi PUS yang sedang hamil dan setelah melahirkan langsung mendapat layanan KB; optimalisasi pelayanan KB terutama untuk KB MKJP di Kota Blitar; Sosialisasi dan pembinaan kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dimana usia ideal menikah perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026
DP3AP2KB Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,89	67,83*	88,22%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00%	100,00%	100,00 %



Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00 %
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1,94	1,93	101,03 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,36	85,66	100,03 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Gender, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 68,73% (tahun 2024 belum rilis dari BPS, sehingga menggunakan realisasi tahun 2023) dari target akhir Renstra 76,89 dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 88,22%
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan; dengan indikator sasaran *Persentase Kelembagaan PUG aktif*, sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 100 % dari target akhir Renstra 100% dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 100 %
- c. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator :
 1. *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan*, sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 100 % dari target akhir Renstra 100 % dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 100 %
 2. *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan*, sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 100 % dari target akhir Renstra 100 % dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 100 %
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB dengan indikator *Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu*



selama masa reproduksi), sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 1,93 dari target akhir Renstra 1,94 dan mengalami tingkat kemajuan 101,03 %

- e. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*, sampai dengan tahun 2024 ini tercapai 85,33 dari target akhir Renstra 85,36 dan mengalami tingkat kemajuan 99,90 %.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2024 DP3AP2KB Kota Blitar tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian DP3AP2KB Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan DP3AP2KB Kabupaten/Kota lainnya ataupun Tingkat Provinsi, dengan perolehan data sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel III. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah Dengan Kab/Kota Lain Tahun 2024

Kinerja	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja			
		Nasional	Provinsi	DP3AP2KB Kab. Blitar	DP3AP2 KB Kota Blitar
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,9	74,9	81,32	67,83*
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	-	-	-	100 %
Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	-	-	100%	100 %
	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	-	-	100%	100 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	TFR (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)	2,11	1,98	1,99	1,93
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	85,32

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- 1) Meningkatnya pemberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 ini belum rilis dari BPS sehingga menggunakan realisasi tahun 2023. Dari tabel di atas diketahui kalau IDG Kota Blitar tahun 2023 yaitu sebesar 67,83 lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Blitar yang sebesar 81,32; realisasi IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 74,9; dan realisasi IDG nasional sebesar 76,9.
- 2) *Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Persentase kasus kekerasan perempuan yang*



diselesaikan, di Kabupaten Blitar realisasinya sebesar 100% dari target 100% dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Untuk realisasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat Provinsi dan tingkat nasional tidak terdapat data.

- 3) *Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak*, dengan indikator *Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan*, di Kabupaten Blitar realisasinya sebesar 100%. Untuk realisasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat Provinsi dan tingkat nasional tidak terdapat data.
- 4) *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)*; dengan indikator *TFR (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)*. Tahun 2024 TFR Kota Blitar sebesar 1,93 dimana ini realisasi paling rendah bila dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Blitar yang realisasinya sebesar 2,01; realisasi Provinsi Jawa Timur 1,98 dan TFR Nasional 2,11. Semakin rendah TFR semakin baik.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2024, jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Persentase Realisasi Anggaran Sesuai Jenis Belanja

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Operasi	9.240.644.433,00	8.565.082.096,00	92,69
2	Belanja Modal	542.284.000,00	471.483.250,00	86,94
JUMLAH		9.782.928.433,00	9.036.565.346,00	92,37



Adapun untuk anggaran dan realisasi belanja per program / kegiatan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.9

Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.523.933.044,00	6.101.947.952,00	93,53
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.258.995.389,00	2.934.617.394,00	90,05
JUMLAH		9.782.928.433,00	9.036.565.346,00	92,37

Tabel III.10

Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.505.746.980,00	4.358.001.788,00	96,72%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.655.900,00	27.705.000,00	96,68%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.922.000,00	13.893.000,00	99,79%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.733.900,00	13.812.000,00	93,74%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.248.008.389,00	3.178.643.567,00	97,86%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.244.358.389,00	3.174.993.567,00	97,86%
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.393.700,00	116.628.700,00	97,68%
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.530.800,00	53.638.800,00	96,59%
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.862.900,00	62.989.900,00	98,63%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.235.248,00	276.651.782,00	93,56%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.581.900,00	8.581.900,00	100%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.939.400,00	18.939.400,00	99,95%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.723.700,00	13.723.700,00	95,64%
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.885.000,00	8.970.000,00	75,47%
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.600,00	17.999.600,00	100,00%
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	4.320.000,00	80%
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.928.440,00	190.447.682,00	91,15%
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.777.800,00	13.669.500,00	99,22%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.177.800,00	107.212.750,00	95,57%
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.177.800,00	107.212.750,00	95,57%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.132.115,00	266.767.639,00	93,56%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.196.000,00	1.196.000,00	100,00%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.374.115,00	66.219.115,00	82,39%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.562.000,00	199.352.524,00	97,93%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.143.828,00	384.392.350,00	93,04%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.274.928,00	80.034.450,00	79,03%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.873.50000	29.425.500,00	98,50%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.995.400,00	272.932.400,00	97,48%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.120.024.994,00	1.080.467.802,00	96,47%
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	79.661.900,00	76.636.190,00	96,20%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	79.661.900,00	76.636.190,00	96,20%
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	440.363.694,00	4412.701.05000	93,72%
a	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	304.363.694,00	281.635.450,00	92,53%
b	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	136.000.000,00	131.065.600,00	96,37%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	599.999.400,00	591.130.562,00	98,52%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTA SE
		Rp	Rp	
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.999.600,00	109.290.365,00	95,04%
b	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	484.999.800,00	481.839.997,00	99,35%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.317.420,00	209.785.892,00	62,93%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	78.066.800,00	66.583.200,00	85,29%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	78.066.800,00	66.583.200,00	85,29%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.162.420,00	52.386.218,00	36,59%
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	117.962.420,00	27.186.218,00	23,05%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.088.200,00	90.816.474,00	81,02%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.013.000,00	56.133.974,00	83,76%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.075.200,00	34,682.500,00	76,94%
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160.231.200,00	156.105.380,00	97,43%
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	82.379.600,00	80.713.830,00	97,98%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	82.379.600,00	80.713.830,00	90,66%
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	77.851.600,00	75.391.550,00	96,84%
a	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.342.600,00	41.721.60000	98,53%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.509.000,00	33.669.950,00	94,82%
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	404.612.450,00	297.587.090,00	73,55%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	164.141.900,00	158.937.600,00	96,83%
a	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak	113.390.900,00	108.716.500,00	95,88%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
	anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA			
b	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	50.751.000,00	50.221.100,00	98,96%
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.517.050,00	42.670.000,00	32,20%
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	13.952.500,00	93,02%
b	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	117.517.050,00	28.717.500,00	24,44%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.953.500,00	95.979.490,00	88,91%
a	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab/Kota	107.953.500,00	95.979.490,00	88,91%

Tabel III.11

Persentase Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	197.600.000,00	162.931.175,00	82,46%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	73.500.000,00	61.501.988,00	83,68%
a	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	26.000.000,00	20.556.400,00	79,06%
b	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	47.500.000,00	40.945.588,00	86,20%
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.100.000,00	101.429.187,00	81.73%
a	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.000.000,00	25.765.500,00	88,85%
b	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	42.600.000,00	30.300.000,00	71,13%
c	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	33.000.000,00	26.372.887,00	79,92%
d	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	19.500.000,00	18.990.800,00	97,39%
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.054.957.978,00	1.788.148.019,00	87,02%
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	499.500.000,00	452.564.419,00	90,60%
a	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	136.035.690,00	82,60%
b	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	64.500.000,00	62.800.479,00	97,37%
c	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	45.000.000,00	41.386.000,00	91,97%
d	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	83.503.000,00	83,50%
e	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150.000.000,00	128.839.250,00	85,89%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	757.623.478,00	690.235.850,00	91,11%
a	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	332.984.478,00	331.360.850,00	99,51%
b	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana	424.639.000,00	358.875.000,00	84,51
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	430.084.500,00	277.831.850,00	64,60%
a	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.500.000,00	5.349.600,00	42,80%
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	325.958.000,00	197.717.750,00	60,66%
c	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	19.876.500,00	19.639.000,00	98,81%
d	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16.300.000,00	13.828.750,00	84,84%
e	Peningkatan Kesertaan KB Pria	41.500.000,00	27.471.750,00	66,20%
f	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	13.950.000,00	13.825.000,00	99,10%
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	367.750.000,00	367.515.900,00	99,94%
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.705.000,00	98,80%
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	154.000.000,00	153.928.550,00	99,95%
c	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	210.000.000,00	209.882.350,00	99,94
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.437.411,00	983.538.200,00	97,72%
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	511.937.411,00	490.228.550,00	95,76%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	240.000.000,00	232.750.000,00	96,98
b	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	164.637.411,00	160.244.300,00	97,33%
c	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	78.500.000,00	77.185.250,00	98,33%
d	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000,00	20.049.000,00	69,61
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	494.500.000,00	493.309.650	99,76
a	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	115.000.000,00	113.809.650	98,96
b	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	379.500.000,00	379.500.000,00	100,00%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 9.036.563.346,00 dari total anggaran Rp 9.782.928.433,00 atau sebesar 92,38%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 termasuk tinggi.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis



dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas P3AP2KB Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 12

Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan DP3AP2KB Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1.120.024.994,00	11,45
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif		
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	333.317.420,00	3,41
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	564.843.650,00	5,77
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	3.258.995.389,00	33,31
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.505.746.980,00	46,06
Total Anggaran			9.782.928.433,00	100,00

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

- Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan meningkatnya pemberdayaan perempuan dengan indikator *Persentase Kelembagaan PUG Aktif* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.120.024.994,00 dari anggaran dinas Rp. **9.782.928.433,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 1 adalah 11,45 % dari seluruh anggaran dinas.
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator :



- 1) *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 333.317.420,00 dari anggaran dinas Rp. **9.782.928.433,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 2 adalah 3,41 % dari seluruh anggaran dinas.
 - 2) *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 564.843.650,00 dari anggaran dinas Rp. **9.782.928.433,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 1 adalah 5,77 % dari seluruh anggaran dinas.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB;
dengan indikator *Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.258.995.389,00 dari anggaran dinas Rp. **9.782.928.433,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 4 adalah 33,31 % dari seluruh anggaran dinas.
- d. Meningkatkan Kinerja perangkat daerah;
dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.505.746.980,00 dari anggaran dinas Rp. **9.782.928.433,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 5 adalah 46,06 % dari seluruh anggaran dinas.



2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.13
Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,20	67,83	91,14	1.120.024.994	1.080.467.802	96,47
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100,00	100,00	100,00			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100,00	100,00	100,00	1.120.024.994	1.080.467.802	96,47
	Persentase perempuan pengambilan keputusan public	47	47	100,00			
	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	0,33	0,33	100,00			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	333.317.420	209.785.892	62,94



Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100,00	100,00	100,00	333.317.420	209.785.892	62,94
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	564.843.650	453.692.470	80,32
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan pelembeagaan pemenuhan hak anak	100,00	100,00	100,00	160.231.200	156.105.380	97,43
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100,00	100,00	100,00	404.612.450	297.587.090	73,55
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	1,94	1,93	101,03	3.258.995.389	2.934.617.394	90,05
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,55	25,99	108,78	197.600.000	162.931.175	82,46
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	74,4	67,40	100,49	2.054.957.978	1.788.148.019	87,02



Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,55	8,10	83,92			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB	74,4	74,65	103,28	1.006.437.411	983.538.200	97,72
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	85,28	102,74	4.505.746.980	4.358.001.788	96,72
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85,06	102,48	4.505.746.980	4.358.001.788	96,72



3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	Ket
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,14	96,47	0,95	Tidak Efisien
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100,00	96,47	1,04	Efisien
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	62,94	1,59	Efisien
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	80,32	1,25	Efisien
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	101,55	90,05	1,13	Efisien
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,39	96,72	1,04	Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi sejauh mana sumber daya seperti ketersediaan anggaran, SDM digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu dengan mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output). Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Sasaran 1 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran



meningkatnya pemberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 96,47 sehingga termasuk tidak efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 91,14% membutuhkan anggaran sebesar 96,47%.

2. Sasaran 2 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Kelembagaan PUG yang aktif” tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1.04 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 96,47%.
3. Sasaran 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak” dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1.39 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 62,94%.
4. Sasaran 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk indikator “Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1.25 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,00% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 80,32%.
5. Sasaran 4 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB” tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1.13 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,55% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 90,05%.
6. Sasaran 5 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya Kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi kinerja dibanding penyerapan anggaran sebesar 1.04 dan dapat dikatakan telah

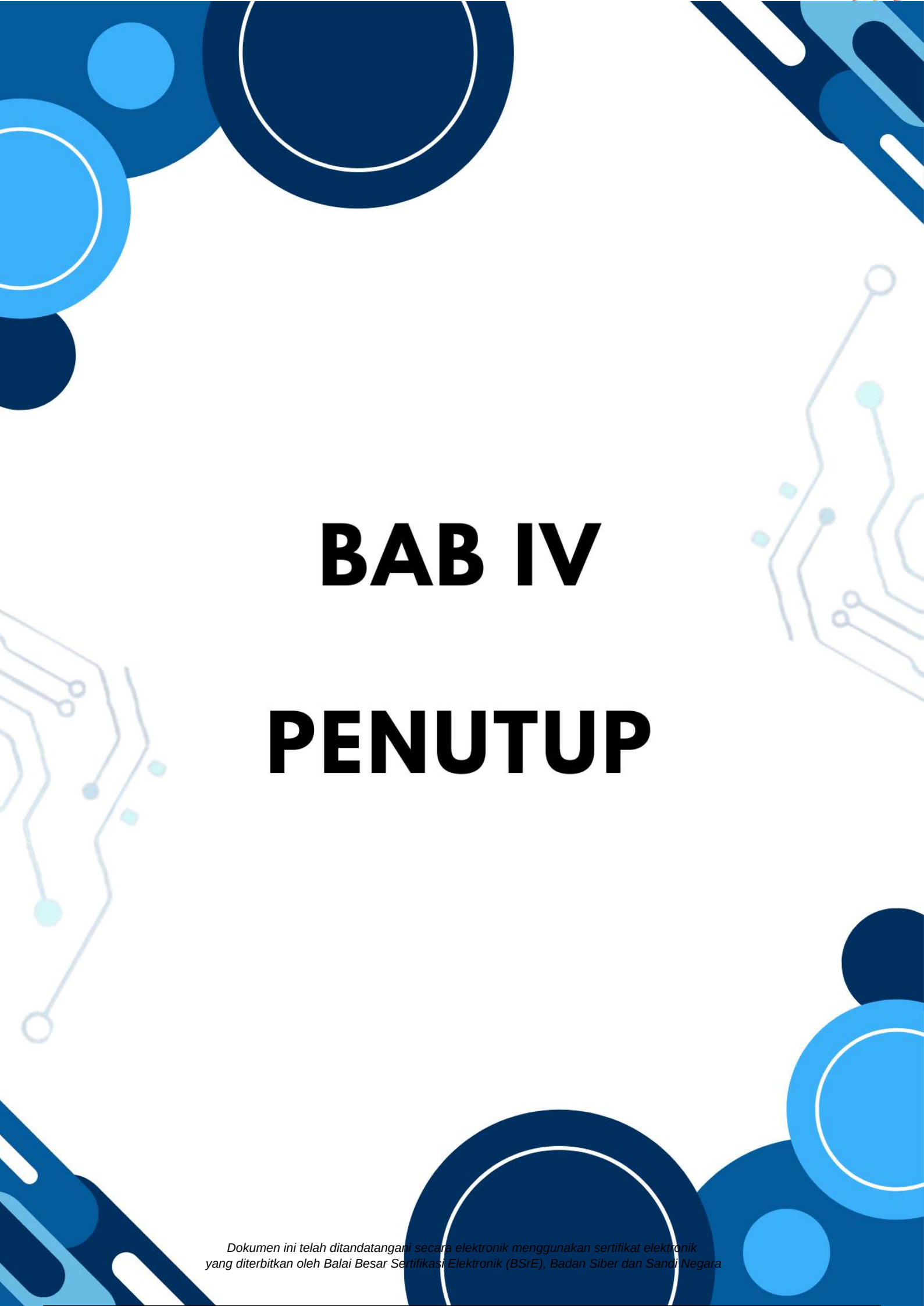


efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,39% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 96,72%.

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Selama tahun 2023 prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari perlombaan yang diadakan baik oleh tingkat Pemerintah Kota, Provinsi maupun Nasional, yaitu :

1. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang telah berhasil membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Desa/Kelurahan sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang menginstruksikan Pembentukan kampung KB di Desa/Kelurahan, yang diberikan pada tanggal 22 April 2024
2. Terbaik 1 Apresiasi Bina Keluarga Remaja Percontohan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diberikan kepada BKR Garuda Kelurahan Gedog Kota Blitar pada tanggal 10 Mei 2024
3. Juara 2 Kampung KB Berseri Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kategori Kota
4. Juara 2 Rumah Dataku Konvensional yang diberikan kepada Kampung KB Sentosa Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo
5. Standarisasi PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) Tahun 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak kategori Pratama yang diberikan kepada Perpustakaan MTs Negeri 1 Kota Blitar



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2024. Laporan ini juga akan dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam beberapa hal yang telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dikarenakan capaian kinerjanya rata-rata 100,00%, walau dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan namun terdapat solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk menyelesaikannya. Adapun uraian capaian indikator sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan gender dengan indikator “Indeks Pemberdayaan Gender” pada tahun 2024 belum rilis dari BPS, sehingga menggunakan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 67,63 dengan capaian kinerja 91,14% dengan kategori **Sangat Berhasil**
2. Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan perempuan” dengan indikator kinerja “Persentase kelembagaan PUG aktif” telah tercapai 66,3% dengan capaian kinerja sebesar 133,88% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
3. Sasaran “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak” dengan



indikator kinerja “Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan” dapat tercapai sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

4. Sasaran “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak” dengan indikator kinerja Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.
5. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dalam program KB” dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR), telah tercapai sesuai target yaitu 1,91 dengan capaian kinerja 101,55% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
6. Sasaran “Meningkatnya Kinerja perangkat daerah” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, telah tercapai sesuai target yaitu 85,66 dengan capaian kinerja 100,04% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan akan dijadikan dasar perbaikan dokumen perencanaan tahunan maupun menengah oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk pencapaian indikator kinerja utama kedepan, antara lain :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Mengadakan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan utamanya di bidang ekonomi, misalnya pelatihan makanan olahan, pelatihan wirausaha, pelatihan digital marketing dan lain-lain pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota, Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Kegiatan **Penguatan** dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan



Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Kelembagaan PUG yang aktif :

Mengadakan sosialisasi PUG bagi masyarakat, organisasi maupun lembaga masyarakat; Pelatihan PUG; Bimtek PPRG; Fasilitas DKRPPA; Fasilitas Penganugerahan Parahita Ekapraya; pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :

- a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai SOP, pada tahun 2024 pada Program Perlindungan Perempuan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, maka :
 - 1) Sosialisasi KtP (Kekerasan terhadap Perempuan)/TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 2) Optimalisasi Pos Curhat di masing-masing kelurahan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan



Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota .

4. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak

- a. Pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak sesuai SOP, pada tahun 2025 pada Program Perlindungan Khusus Anak; Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
- b. Peningkatan kualitas SDM di Bidang Perlindungan Anak, dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat/anak-anak dalam pencegahan kekerasan anak di Program Perlindungan Khusus Anak; Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/Kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA.

5. Total Fertility Rate (TFR)

- a. Diperlukan inovasi dalam meningkatkan kerjasama dengan institusi sekolah di Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal



dan Informal

- b. Peningkatan kapasitas kader dalam program KB khususnya tentang metode penggerakan masyarakat dan pengetahuan kontrasepsi terkini, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Refreshing Penyuluh KB dan kader terkait Kontrasepsi dan Penggerakan Masyarakat untuk ber KB; Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera; Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Demikian semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 dapat sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta masukan bagi segenap pihak yang berkepentingan.



LAMPIRAN



MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI KE 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,35	68,6	67,8	67,87	74,2	75,5	76,59	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	47,25	-	47,26	47,28	100	100	100	1. Penyusunan payung hukum tentang PUG 2. Peningkatan kapasitas perempuan 3. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik 4. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
										Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di kali 100	100	100	100	100	100	100	100	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
										Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
																				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI KE 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	1,06	0,6	0,67	0,67	1	1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	2,14	2,13	2,13	2,12	1,94	1,94	1,94	1. Peningkatan partisipasi pesertaKB aktif 2. Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB 3. Peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15- 19 tahun) 4. Optimalisasi peningkatan keluargasejahtera	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			

VISI KOTA BLITAR
 MISI KE 5

: TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (82)	A (83)	A (85,32)	A (85,34)	A (85,36)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (82)	A (83)	A (85,32)	A (85,34)	A(85,36)	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Blitar, 3 Januari 2024
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kota Blitar

PARMINTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nl 197106121993011001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

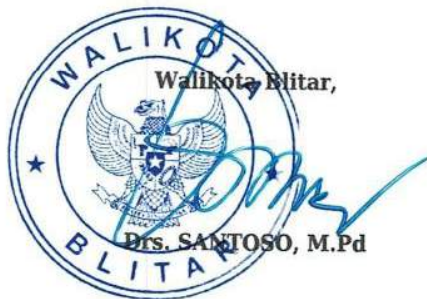
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PARMINTO., S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



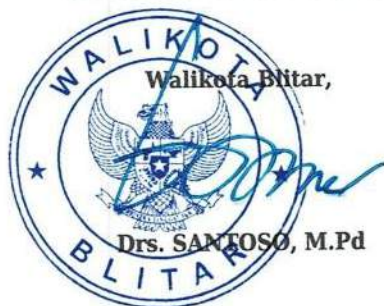
Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Kota Blitar,

DP3A P2KB
PARMINTO., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612-199301 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74.20(indeks)
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program KB	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	1.94(Angka)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	100.00(Persen)
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100.00(Persen)
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100.00(Persen)
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.32(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	404,612,450.00	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160,231,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,006,437,411.00	DAK Non Fisik-BOKB-KB,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333,317,420.00	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,054,957,978.00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana,DAK Non Fisik-BOKB-KB,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,120,024,994.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	197,600,000.00	DAK Non Fisik-BOKB-KB,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,505,746,980.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		9,782,928,433.00	





PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN (P-RKT)

2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA BLITAR

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Target 2024	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target 2024	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2024	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Dana
Meningkatnya kinerja Peragkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	13,922,000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	14,733,900
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	3,244,358,389
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 laporan	3,650,000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99 paket	55,530,800
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 orang	63,862,900
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum PD sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	8,581,900
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	18,939,400
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	13,723,700
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	11,885,000

								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17,999,600		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	5,400,000		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	208,928,440		
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 paket	13,777,208		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 unit	112,177,800
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,196,000
						Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	80,374,115	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	203,562,000	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	101,274,928
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	29,873,500	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	279,995,400	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2,000,000	

Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100.00%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	0.003	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran yang responsif Gender	37%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	79,661,900
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi	20,54 %	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 dokumen	304,363,694
				Persentase perempuan pengambil keputusan publik	47				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	136,000,000
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	3 organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 lembaga	114,999,600
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2759 orang	484,999,800
				Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 orang	25,200,000

						Kewenangan Kabupaten/Kota			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 layanan	117,962,420
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 orang	67,013,000
									Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	45,075,200
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	100.00%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	82,379,600
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100%	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 anak	42,342,600
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	35,509,000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100.00%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100%	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	113,390,900

									Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	10 orang	50,751,000
								100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	30 orang	15,000,000
									Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 layanan	117,517,050
								100%	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah/kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	348 orang	107,953,500
Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	1,94	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23.35	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	26,000,000
									Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 pendidikan	47,500,000
								100%	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6 Dokumen	29,000,000.00
									Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	42,000,000.00

								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	33,000,000.00			
								Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	19,500,000.00			
								Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	140,000,000			
								Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	64,500,000			
								Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Laporan	45,000,000			
								Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100,000,000			
								Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	150,000,000			
								Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100%	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359 Orang	332,984,478
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)	8,55	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi KIE	3 kecamatan	
									Persentase peserta KB aktif	74,4	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			

				(PKB/PLKB)			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan	4 laporan	424,639,000
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	12,500,000
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang	325,958,000
							Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	33,500,000
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	16,300,000
							Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	270 Orang	77,500,000
							Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	150 Orang	13,950,000

				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	100%	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3,750,000
							Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	21 unit	210,000,000
							Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampung	154,000,000
			74,4	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100%	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	28,800,000
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	78,500,000
							Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	240,000,000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB					

							Orientasi/Pelatihan TeknisPelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	807 orang	164,637,411		
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	laporan	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/Kelahiran Baduta / Balita	3 laporan	115,000,000
									Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/Kelahiran Baduta / Balita yang mendapat pendampingan	laporan	379,500,000

Blitar, 20 Oktober 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana
Kota Blitar

PARMINTO, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199301 1 001